

PEMKO SOLOK TERIMA OPINI PENILAIAN DARI OMBUDSMAN

Jum'at, 27 Februari 2026 - sumbar

RRI.CO.ID, Padang - Pemerintah Kota Solok menerima hasil Opini Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat, Selasa, 24 Februari 2026. Hasil penilaian tersebut diserahkan langsung Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat, Adel Wahidi kepada Wali Kota Solok, Ramadhani Kirana Putra, di Ruang Rapat Zahirmi Ajiz, Balai Kota Solok,

Penilaian ini merupakan bagian dari pengawasan rutin Ombudsman terhadap kepatuhan standar pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Selain penilaian secara umum terhadap Pemerintah Kota Solok, Ombudsman juga menyerahkan rapor hasil penilaian kepada tiga perangkat daerah yang menjadi lokus penilaian tahun ini, yakni RSUD Kota Solok, Dinas Sosial Kota Solok, dan Dinas Pendidikan Kota Solok.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan teknis serta diskusi terkait penguatan standar pelayanan publik guna memastikan seluruh indikator kepatuhan dapat dipenuhi secara optimal.

Dalam sambutannya, Wali Kota Solok Ramadhani Kirana Putra menyampaikan bahwa hasil penilaian tersebut menjadi cerminan kualitas tata kelola pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Solok. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan Ombudsman.

"Kami berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan. Rekomendasi ini menjadi panduan dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik maladministrasi," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan Ombudsman sebagai fungsi pengawasan eksternal agar penyelenggaraan pelayanan publik tetap berjalan sesuai ketentuan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

"Pemerintah Kota Solok berharap hasil evaluasi tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat," katanya.